



Analisis Kekerasan dalam Pendidikan di Era Digitalisasi

Hayumi¹, Entu Amalia², Maesaroh³, Ani Sakinah⁴, Saepul Umar⁵, Munif Latif⁶

^{1,2,3,4,5} Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Primagraha

hayumiabud@gmail.com, entuamalia@gmail.com, mae33541@gmail.com, anisakinahani@gmail.com,

saepulumar91@gmail.com, muniflatif37@gmail.com

Abstrak

Kajian ini bertujuan mengeksplorasi transformasi manifestasi kekerasan dalam ekosistem pendidikan di tengah pesatnya arus digitalisasi. Meskipun lembaga pendidikan secara normatif dan yuridis dirancang sebagai ruang yang aman, inklusif, dan kondusif bagi perkembangan peserta didik, realitas menunjukkan masih berlangsungnya berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, verbal, emosional, maupun struktural. Perkembangan teknologi informasi turut memperluas bentuk kekerasan ke ruang digital melalui cyberbullying, yang memiliki karakteristik anonimitas, penyebaran informasi yang cepat, serta jangkauan yang luas sehingga dampaknya lebih kompleks dibandingkan kekerasan konvensional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research, yaitu mengkaji dan menganalisis berbagai literatur ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen resmi yang relevan dengan tema penelitian. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk mengidentifikasi pola, penyebab, dampak, dan strategi penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kekerasan digital berkontribusi signifikan terhadap penurunan kesehatan mental, meningkatnya kecemasan dan depresi, menurunnya motivasi serta prestasi akademik, dan terganggunya interaksi sosial peserta didik. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh ketidakseimbangan antara pesatnya penguasaan teknologi dengan rendahnya kompetensi kewarganegaraan digital (digital citizenship) serta literasi digital yang berorientasi pada etika. Oleh karena itu, diperlukan penguatan literasi digital berbasis kecerdasan emosional, pendidikan karakter, serta kolaborasi antara sekolah, keluarga, pemerintah, dan masyarakat dalam membangun lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan protektif guna mendukung tumbuh kembang generasi yang berakhlak, berdaya saing, dan bertanggung jawab di era digital.

Kata Kunci: Kekerasan Pendidikan, Era Digital, Literasi Digital.

1. Latar Belakang

Idealnya, institusi pendidikan berdiri sebagai salah satu pilar utama dalam menjamin keamanan, kenyamanan, serta keberlangsungan proses pertumbuhan intelektual dan pembentukan karakter setiap peserta didik. Sekolah tidak hanya memiliki fungsi sebagai ruang transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai lingkungan sosial yang berperan dalam menanamkan nilai moral, etika, kedisiplinan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam konteks tersebut, proses pendidikan seharusnya berlangsung dalam suasana yang aman, inklusif, demokratis, dan terbebas dari berbagai bentuk kekerasan maupun diskriminasi. Landasan hukum mengenai perlindungan anak juga secara tegas mengamanatkan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan selama berada di lingkungan satuan pendidikan. Dengan demikian, sekolah semestinya menjadi zona aman yang mampu melindungi peserta didik dari intimidasi, perundungan, diskriminasi, eksploitasi, maupun tindakan kekerasan yang dapat menghambat perkembangan fisik, psikologis, sosial, dan akademiknya.

Namun demikian, realitas yang terjadi di berbagai lingkungan pendidikan justru memperlihatkan sebuah paradoks yang memprihatinkan. Institusi pendidikan yang secara normatif diharapkan menjadi tempat penyemaian nilai moral dan kemanusiaan masih menghadapi berbagai praktik kekerasan, baik yang dilakukan secara individual maupun terbentuk melalui pola interaksi yang berlangsung secara sistemik. Kekerasan dalam pendidikan dapat muncul melalui hubungan antara pendidik dan peserta didik, antarpeserta didik, maupun melalui mekanisme dan budaya kelembagaan yang kurang memberikan perlindungan terhadap kelompok yang berada pada posisi rentan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja belum sepenuhnya mampu menjamin terciptanya lingkungan pendidikan yang aman apabila tidak disertai dengan implementasi kebijakan, pengawasan, serta pembentukan budaya sekolah yang berorientasi pada perlindungan dan penghormatan terhadap hak peserta didik. Secara substansial, kekerasan dalam lingkungan pendidikan sering kali berkaitan erat dengan ketimpangan relasi kuasa. Pihak yang memiliki posisi, otoritas, senioritas, kekuatan fisik, maupun pengaruh sosial yang lebih besar berpotensi melakukan tindakan dominatif terhadap individu yang memiliki posisi lebih lemah. Ketimpangan tersebut dapat melahirkan perilaku koersif berupa ancaman, penghinaan, pemberian hukuman secara berlebihan, intimidasi, pengucilan, hingga tindakan fisik. Dalam relasi pendidikan, ketidakmampuan mengelola otoritas secara proporsional dapat mengubah proses pembinaan menjadi tindakan represif. Akibatnya, peserta didik tidak lagi memandang sekolah sebagai ruang yang memberikan rasa aman, tetapi sebagai lingkungan yang berpotensi menimbulkan kecemasan dan ketakutan.

Fenomena kekerasan tersebut tidak hanya berakibat pada tindakan fisik yang meninggalkan luka secara kasatmata. Kekerasan telah berkembang ke dalam berbagai bentuk yang lebih kompleks, terutama kekerasan verbal,

Analisis Kekerasan dalam Pendidikan di Era Digitalisasi

emosional, psikologis, sosial, bahkan tekanan akademik yang berlebihan. Penghinaan terhadap kemampuan peserta didik, pemberian label negatif, ancaman, memperlakukan siswa di depan kelas, pengucilan sosial, maupun tuntutan akademik yang tidak mempertimbangkan kondisi psikologis dapat memberikan dampak serius terhadap perkembangan peserta didik. Dampaknya dapat terlihat melalui menurunnya kepercayaan diri, hilangnya motivasi belajar, munculnya kecemasan, terganggunya hubungan sosial, hingga penurunan prestasi akademik.

Ironisnya, sebagian praktik tersebut masih kerap dibungkus dalam narasi “pendisiplinan” dan dianggap sebagai bagian yang wajar dari proses pendidikan. Kekerasan verbal, hukuman yang merendahkan martabat, maupun tekanan akademik yang tidak sehat terkadang dipersepsikan sebagai metode untuk membentuk kepatuhan dan meningkatkan prestasi peserta didik. Normalisasi semacam ini menjadi persoalan serius karena dapat mengaburkan batas antara tindakan pendidikan yang konstruktif dengan praktik kekerasan. Oleh sebab itu, diperlukan perubahan paradigma pendidikan dari pendekatan yang berorientasi pada dominasi dan hukuman menuju pendekatan yang humanis, dialogis, serta berlandaskan perlindungan hak anak. Institusi pendidikan perlu membangun sistem pencegahan, pelaporan, penanganan, serta pemulihan yang efektif agar sekolah benar-benar menjadi ruang aman bagi perkembangan intelektual, emosional, sosial, dan karakter peserta didik.

Memasuki era digitalisasi, spektrum kekerasan dalam dunia pendidikan mengalami metamorfosis menjadi bentuk yang jauh lebih kompleks dan sulit dideteksi. Penetrasi teknologi informasi yang masif telah menggeser panggung kekerasan dari ruang kelas konvensional ke ranah siber. Perangkat digital yang sejatinya diciptakan untuk mempermudah akses ilmu pengetahuan, kini justru beralih fungsi menjadi instrumen penyerangan mental yang bekerja tanpa sekat ruang dan waktu. Karakteristik kekerasan digital yang cenderung anonim dan masif menjadikannya jauh lebih berbahaya, karena beban emosional yang diterima korban tidak berhenti saat jam sekolah usai, melainkan terus menghantui di ruang privat sekalipun. Dampak yang ditimbulkan bersifat multidimensional; mulai dari degradasi prestasi akademik dan runtuhnya kepercayaan diri, hingga risiko gangguan psikologis kronis yang dapat menetap hingga masa dewasa. Kondisi ini semakin diperparah dengan munculnya berbagai bentuk kekerasan struktural serta isu-isu berbasis eksklusivitas di lingkungan akademik, yang secara kolektif mengancam integritas institusi pendidikan.

Sebagai penulis, kami memandang bahwa lonjakan kasus kekerasan di era digital ini merupakan potret nyata dari kegagalan kita secara kolektif dalam menyelaraskan percepatan teknologi dengan kematangan etika digital. Ada disparitas yang sangat mengkhawatirkan antara kemahiran teknis dalam mengoperasikan perangkat digital dengan rendahnya kesadaran moral dalam berinteraksi di ruang virtual. Masyarakat kita seolah-olah hanya dididik untuk menjadi pengguna yang canggih, namun abai terhadap tanggung jawab sebagai warga digital yang beretika. Jika langkah-langkah preventif yang bersifat sistemik tidak segera diimplementasikan, maka lembaga pendidikan terancam kehilangan fungsinya sebagai kawah candradimuka pembentukan moralitas bangsa.

Oleh sebab itu, menurut pandangan saya, urgensi saat ini bukan lagi sekadar mengajarkan literasi digital sebatas kecakapan teknis, melainkan harus menyentuh ranah kecerdasan emosional dan empati digital. Literasi digital harus dipahami sebagai upaya untuk menanamkan kesadaran bahwa setiap interaksi di layar kaca memiliki konsekuensi nyata bagi kemanusiaan. Perlu adanya konsolidasi yang kuat dan sinergis antara pendidik, orang tua, serta penyedia platform teknologi untuk merumuskan protokol perlindungan yang lebih ketat. Tanpa komitmen bersama untuk membangun ekosistem digital yang bersih dan sehat, pola komunikasi toksik ini akan terus mengakar dan berisiko merusak tatanan sosial serta kualitas generasi yang akan datang. Kita memerlukan revolusi dalam pola asuh dan pola ajar digital agar teknologi tidak lagi menjadi senjata penghancur, melainkan sarana penguat peradaban.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan library research (studi pustaka) sebagai landasan metodologis utama. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang berorientasi pada pengkajian, pemahaman, serta analisis secara mendalam terhadap berbagai konsep, teori, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian. Metode kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk mendeskripsikan fenomena secara sistematis berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber literatur, tanpa melakukan manipulasi terhadap objek penelitian. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perkembangan teori, perspektif para ahli, serta temuan-temuan empiris yang telah dipublikasikan sebelumnya sehingga mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai permasalahan yang dikaji.

Pendekatan library research menempatkan berbagai sumber kepustakaan sebagai sumber data utama dalam penelitian. Data diperoleh melalui proses penelusuran, pengumpulan, dan seleksi berbagai referensi yang memiliki relevansi tinggi dengan fokus penelitian. Sumber-sumber tersebut meliputi buku teks, jurnal ilmiah nasional maupun internasional, artikel hasil penelitian, prosiding seminar, laporan penelitian, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi lembaga pemerintah maupun organisasi, serta berbagai publikasi akademik lainnya yang memiliki kredibilitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selain sumber cetak, penelitian ini juga memanfaatkan sumber digital yang tersedia melalui berbagai basis data ilmiah, seperti Google Scholar,

ScienceDirect, SpringerLink, Scopus, SINTA, Garuda, dan repositori perguruan tinggi. Pemanfaatan berbagai sumber tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi yang mutakhir sekaligus memperkaya perspektif dalam membahas permasalahan penelitian.

Proses pengumpulan data dilakukan secara bertahap dan sistematis. Tahap pertama diawali dengan identifikasi kata kunci yang sesuai dengan fokus penelitian untuk mempermudah proses penelusuran literatur. Selanjutnya dilakukan penyaringan terhadap berbagai referensi berdasarkan relevansi tema, kualitas publikasi, tahun terbit, serta kredibilitas penulis atau lembaga penerbit. Literatur yang telah terseleksi kemudian dikumpulkan dan didokumentasikan menggunakan teknik pencatatan (*note-taking*) sehingga memudahkan peneliti dalam mengelompokkan informasi berdasarkan tema-tema tertentu. Tahapan ini sangat penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar mendukung tujuan penelitian dan memiliki tingkat validitas yang tinggi.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) yang dipadukan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Seluruh data yang telah terkumpul terlebih dahulu dibaca secara menyeluruh untuk memperoleh pemahaman terhadap isi setiap sumber. Selanjutnya dilakukan proses reduksi data dengan memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian, kemudian mengelompokkan data ke dalam kategori atau tema tertentu berdasarkan kesamaan konsep maupun substansi pembahasan. Setelah proses klasifikasi selesai, peneliti melakukan interpretasi terhadap data dengan membandingkan berbagai pandangan para ahli, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan hasil penelitian terdahulu, serta menarik hubungan antarkonsep yang mendukung pembahasan penelitian. Hasil interpretasi tersebut kemudian disusun secara sistematis sehingga menghasilkan uraian yang logis, runtut, dan mampu menjawab rumusan masalah penelitian secara komprehensif. Untuk menjaga kualitas penelitian, peneliti menerapkan prinsip ketelitian akademik melalui evaluasi kritis terhadap setiap sumber yang digunakan. Literatur yang dipilih diutamakan berasal dari publikasi ilmiah yang telah melalui proses penelaahan sejawat (*peer review*) atau diterbitkan oleh lembaga yang memiliki reputasi baik. Selain itu, peneliti juga melakukan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai referensi sehingga diperoleh data yang lebih objektif dan dapat dipercaya. Pendekatan ini membantu meminimalkan subjektivitas peneliti dalam menginterpretasikan data sekaligus meningkatkan kredibilitas hasil penelitian.

Penggunaan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka memberikan beberapa keunggulan dalam penelitian ini. Pertama, metode ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai perkembangan konsep dan teori yang berkaitan dengan topik penelitian. Kedua, studi pustaka memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi kesenjangan penelitian (*research gap*) serta menemukan peluang pengembangan konsep yang belum banyak dibahas oleh penelitian sebelumnya. Ketiga, pendekatan ini mampu menghasilkan sintesis berbagai temuan empiris sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam membangun argumentasi ilmiah yang kuat.

Dengan demikian, penerapan metode kualitatif deskriptif melalui pendekatan *library research* tidak hanya berfungsi sebagai teknik pengumpulan data, tetapi juga sebagai strategi ilmiah untuk menyusun kerangka konseptual yang kokoh dan menghasilkan analisis yang mendalam. Melalui proses pengumpulan, seleksi, evaluasi, klasifikasi, dan interpretasi literatur secara sistematis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai topik yang dikaji, memperkuat landasan teoritis penelitian, serta memetakan posisi penelitian dalam perkembangan literatur ilmiah yang terus berkembang.

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Pengertian Kekerasan dalam Pendidikan

Kekerasan adalah tindakan yang melibatkan pemaksaan, tekanan, atau dominasi terhadap orang lain. Tindakan ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam hubungan sosial dan melanggar norma yang berlaku di masyarakat[1]. Kekerasan merupakan perilaku menyimpang yang menimbulkan penderitaan serta kerugian bagi orang lain, baik secara fisik maupun mental. Menurut Adami Chazawi, tindakan kekerasan seperti pelecehan dilakukan secara sengaja dengan tujuan menyakiti atau menimbulkan cedera pada pihak lain. Secara umum, kekerasan dapat dibedakan menjadi dua bentuk. Pertama, kekerasan fisik yang menyebabkan luka, penderitaan jasmani, bahkan dapat berakibat fatal hingga kematian. Kedua, kekerasan psikis yang tidak selalu menimbulkan dampak pada tubuh korban, tetapi meninggalkan tekanan emosional dan trauma mental yang berlangsung dalam waktu lama[2].

Hingga saat ini, berbagai bentuk kekerasan masih dapat ditemukan di lembaga pendidikan di Indonesia. Kejadian tersebut dipengaruhi oleh beragam faktor, mulai dari lingkungan sosial, pola asuh, budaya sekolah, hingga hal-hal yang terlihat sepele namun dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan. Kekerasan dalam dunia pendidikan masih menjadi permasalahan yang kerap ditemukan di Indonesia[3]. Berbagai kasus menunjukkan adanya tindakan kekerasan yang terjadi dalam hubungan antara pendidik dan peserta didik, baik dalam bentuk fisik, verbal, maupun psikologis. Fenomena ini menunjukkan bahwa lingkungan pendidikan belum sepenuhnya mampu menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman bagi siswa.

Pada dasarnya, kekerasan dalam lingkungan pendidikan merupakan fenomena kompleks yang dapat melibatkan berbagai aktor dengan pola hubungan dan latar belakang yang berbeda. Tindakan kekerasan tidak hanya terjadi dalam hubungan antarpeserta didik, tetapi juga dapat berlangsung antara senior dan junior, pendidik dengan peserta didik, pimpinan sekolah dengan tenaga kependidikan, bahkan antarsesama anggota civitas akademika. Perbedaan kedudukan, kewenangan, usia, senioritas, maupun kekuatan sosial dapat menciptakan ketimpangan relasi kuasa yang berpotensi disalahgunakan untuk melakukan intimidasi atau tindakan represif terhadap pihak yang dianggap lebih lemah. Oleh karena itu, segala bentuk kekerasan dalam institusi pendidikan tidak dapat dibenarkan, terlepas dari alasan yang digunakan oleh pelaku, termasuk alasan kedisiplinan, pembinaan, tradisi senioritas, pemberian efek jera, maupun upaya mempertahankan kewibawaan.

Dalam hubungan antarpeserta didik, kekerasan sering muncul dalam bentuk perundungan, intimidasi, pengucilan, penghinaan, ancaman, pemaksaan, hingga tindakan fisik. Praktik senioritas juga dapat menjadi salah satu faktor yang membuka ruang terjadinya kekerasan, terutama ketika senior merasa memiliki legitimasi untuk mengontrol atau memberikan perlakuan tertentu kepada junior. Pada konteks hubungan antara pendidik dan peserta didik, kekerasan dapat muncul ketika kewenangan pendidikan diterapkan secara berlebihan, misalnya melalui hukuman fisik, penghinaan di depan kelas, ancaman terhadap nilai akademik, pemberian label negatif, maupun tekanan psikologis. Demikian pula dalam hubungan pimpinan dengan tenaga kependidikan, tekanan pekerjaan, komunikasi yang merendahkan, intimidasi, diskriminasi, dan penyalahgunaan kewenangan dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan apabila menimbulkan kerugian fisik maupun psikologis terhadap individu yang mengalaminya.

Fenomena kekerasan juga dapat ditemukan dalam kehidupan pendidikan tinggi. Mahasiswa sebagai bagian dari civitas akademika memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan pendapat, termasuk melalui kegiatan organisasi maupun aksi demonstrasi. Namun, dalam situasi tertentu, perbedaan pandangan dan kepentingan dapat berkembang menjadi konflik yang mengarah pada tindakan kekerasan. Bentuknya tidak selalu berupa kontak fisik, tetapi dapat berupa penghinaan, provokasi, ucapan kasar, ancaman, ujaran yang merendahkan, hingga tindakan verbal yang menyerang identitas maupun martabat individu atau kelompok tertentu. Eskalasi konflik bahkan dapat berkembang menjadi bentrokan antarkelompok mahasiswa, perkelahian, kerusakan fasilitas, serta tindakan lain yang bertentangan dengan nilai-nilai akademik dan prinsip penyelesaian konflik secara dialogis.

Perkembangan teknologi informasi selanjutnya menghadirkan dimensi baru dalam fenomena kekerasan pendidikan. Interaksi civitas akademika yang sebelumnya lebih banyak berlangsung secara langsung kini semakin terintegrasi dengan berbagai media digital. Media sosial, aplikasi percakapan, forum daring, dan berbagai platform komunikasi memberikan kemudahan dalam membangun interaksi, tetapi pada saat yang sama dapat menjadi sarana munculnya kekerasan berbasis digital. Fenomena ini terlihat melalui cyberbullying, penyebaran penghinaan, komentar merendahkan, pelecehan verbal secara daring, penyebaran informasi pribadi tanpa izin, penyebaran foto atau video dengan tujuan memperlakukan, hingga pembentukan opini negatif terhadap individu tertentu.

Transformasi kekerasan ke ranah siber menjadikan persoalan kekerasan pendidikan semakin kompleks karena tindakan tersebut tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Korban dapat menerima tekanan bahkan ketika telah berada di luar lingkungan sekolah atau kampus. Selain itu, karakteristik media digital memungkinkan suatu konten tersebar dengan cepat, tersimpan dalam jangka panjang, dan disaksikan oleh khalayak yang jauh lebih luas. Kondisi tersebut berpotensi memperbesar dampak psikologis dan sosial yang dialami korban. Oleh karena itu, pencegahan kekerasan dalam pendidikan pada era digital tidak cukup hanya berfokus pada pengawasan interaksi secara langsung, tetapi juga membutuhkan penguatan literasi digital, etika komunikasi, mekanisme pengaduan, perlindungan korban, serta pembangunan budaya akademik yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap martabat setiap individu[4].

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tindakan kekerasan di lingkungan pendidikan merupakan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai pendidikan karena dapat menimbulkan gangguan terhadap kondisi jasmani maupun psikologis peserta didik, terutama di era digitalisasi yang semakin berkembang. Oleh karena itu, dibutuhkan peran dan kepedulian bersama dari seluruh pihak untuk membangun suasana belajar yang tenteram, positif, dan terbebas dari segala bentuk kekerasan, baik secara langsung maupun melalui media digital, dengan menanamkan nilai moral, etika, serta sikap saling menghormati.

3.2. Macam-Macam Kekerasan dalam Pendidikan

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sekolah seharusnya menjadi lingkungan yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Setiap anak yang menempuh pendidikan berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah, sehingga proses belajar dapat berlangsung dengan nyaman dan kondusif[5].

Kekerasan fisik merupakan jenis kekerasan yang paling mudah dikenali karena dilakukan secara langsung pada tubuh korban. Bentuknya dapat berupa tindakan seperti memukul, menendang, menampar, mencubit, hingga pemberian hukuman fisik seperti push-up atau berdiri di bawah sinar matahari dalam waktu tertentu. Walaupun sering dianggap sebagai cara untuk mendisiplinkan, pada kenyataannya tindakan tersebut justru dapat

membiasakan kekerasan dalam dunia pendidikan dan lebih menimbulkan rasa takut daripada membentuk kedisiplinan yang sebenarnya.

Kekerasan verbal adalah tindakan yang dilakukan melalui kata-kata yang bersifat merendahkan, seperti menghina, mengancam, mengejek, atau memberikan panggilan yang tidak pantas dan menyakitkan. Perilaku ini sering muncul dalam interaksi sehari-hari, baik antara guru dan siswa maupun sesama peserta didik. Kekerasan verbal kerap dianggap sepele karena hanya berupa ucapan, padahal kata-kata memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan konsep diri seseorang. Dampaknya dapat membuat korban merasa tidak berharga, kehilangan rasa percaya diri, serta menarik diri dari lingkungan sosial[6].

Kekerasan psikologis merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam lingkungan pendidikan yang cenderung lebih tersembunyi dan sulit dikenali secara langsung dibandingkan dengan kekerasan fisik. Apabila kekerasan fisik dapat diidentifikasi melalui luka atau tanda yang terlihat pada tubuh korban, kekerasan psikologis lebih banyak menyerang kondisi emosional, mental, harga diri, dan rasa aman seseorang. Bentuk kekerasan ini dapat terjadi secara berulang maupun dalam tindakan tertentu yang memberikan tekanan psikologis terhadap korban. Wujudnya dapat berupa intimidasi, ancaman, manipulasi, pengucilan sosial, perlakuan diskriminatif, pemberian tekanan secara berlebihan, hingga tindakan yang membuat seseorang merasa tidak dihargai atau tidak diterima dalam lingkungan pendidikan. Karena dampaknya tidak selalu terlihat secara kasatmata, kekerasan psikologis sering kali tidak disadari oleh lingkungan sekitar, bahkan dalam beberapa kondisi dianggap sebagai bagian yang biasa dari dinamika interaksi sosial dan proses pendidikan.

Dalam kehidupan peserta didik, kekerasan psikologis dapat muncul melalui berbagai bentuk interaksi sehari-hari. Salah satu contohnya adalah ketika seorang peserta didik secara sengaja tidak dilibatkan dalam kegiatan kelompok, diabaikan oleh teman-temannya, diabaikan dalam komunikasi, atau dikucilkan karena perbedaan latar belakang sosial, kemampuan akademik, kondisi ekonomi, penampilan fisik, maupun karakteristik personal lainnya. Pengucilan tersebut dapat menyebabkan korban merasa tidak memiliki tempat dalam lingkungan sosialnya. Selain itu, pemberian julukan yang merendahkan, mempermalukan peserta didik di hadapan orang lain, membandingkan kemampuan akademiknya secara tidak proporsional, serta memberikan komentar yang meremehkan juga dapat menjadi bentuk tekanan psikologis. Apabila berlangsung secara berulang, tindakan tersebut berpotensi membentuk persepsi negatif korban terhadap dirinya sendiri.

Kekerasan psikologis juga dapat muncul melalui tekanan akademik yang berlebihan. Peserta didik terkadang menghadapi tuntutan untuk selalu memperoleh nilai tinggi, menjadi juara kelas, memenangkan kompetisi, atau memenuhi standar prestasi tertentu tanpa mempertimbangkan kemampuan dan kondisi psikologisnya. Pada dasarnya, pemberian target akademik merupakan bagian dari upaya mendorong peserta didik untuk berkembang. Namun, tuntutan tersebut dapat berubah menjadi tekanan psikologis ketika disertai ancaman, penghinaan, perbandingan yang merendahkan, atau pemberian konsekuensi yang tidak proporsional apabila target tidak tercapai. Kondisi tersebut dapat menyebabkan peserta didik memandang proses belajar bukan lagi sebagai aktivitas pengembangan diri, tetapi sebagai sumber tekanan dan ketakutan terhadap kegagalan.

Meskipun tidak menimbulkan luka fisik, kekerasan psikologis dapat memberikan konsekuensi yang mendalam terhadap perkembangan peserta didik. Korban dapat mengalami penurunan rasa percaya diri, kecemasan, ketakutan, perasaan tidak berharga, kesulitan membangun hubungan sosial, serta kehilangan motivasi untuk mengikuti proses pembelajaran. Dalam jangka panjang, tekanan psikologis yang berlangsung secara terus-menerus juga berpotensi memengaruhi konsentrasi belajar, keterlibatan dalam kegiatan sekolah, dan pencapaian akademik. Bahkan, peserta didik dapat memilih menarik diri dari lingkungan sosial karena merasa bahwa sekolah bukan lagi menjadi ruang yang memberikan keamanan dan kenyamanan.

Permasalahan kekerasan psikologis menjadi semakin kompleks ketika tindakan tersebut telah mengalami normalisasi dalam budaya pendidikan. Pengucilan terkadang dianggap sebagai persoalan pertemanan biasa, sementara intimidasi dan tekanan berlebihan dapat dipersepsikan sebagai bagian dari proses pembentukan mental atau kedisiplinan. Padahal, apabila tindakan tersebut merendahkan martabat dan mengganggu kesejahteraan psikologis peserta didik, diperlukan perhatian serta penanganan yang serius. Oleh karena itu, institusi pendidikan perlu meningkatkan kemampuan pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, dan orang tua dalam mengenali indikator kekerasan psikologis sejak dini. Upaya pencegahan juga perlu dilakukan melalui penguatan komunikasi yang empatik, layanan konseling yang mudah diakses, mekanisme pengaduan yang aman dan rahasia, serta pembentukan budaya sekolah yang inklusif. Dengan demikian, lingkungan pendidikan dapat berkembang menjadi ruang yang tidak hanya terbebas dari kekerasan fisik, tetapi juga mampu memberikan rasa aman secara emosional dan psikologis bagi setiap peserta didik.

Kekerasan akademik terjadi ketika kegiatan pembelajaran justru menimbulkan tekanan bagi peserta didik. Bentuknya dapat berupa pemberian tugas yang terlalu banyak, penilaian yang tidak adil, sistem penilaian yang kurang terbuka, serta perlakuan yang tidak sama dari pendidik terhadap siswa tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa lembaga pendidikan tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga dapat menjadi ruang terjadinya ketidakadilan dalam proses akademik[7].

Menurut Think Before Text, cyberbullying merupakan perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja oleh individu atau kelompok secara berulang melalui media elektronik kepada seseorang yang lebih lemah, di mana korban sering kali tidak mampu langsung membalas atau menghentikan tindakan tersebut[8].

Kekerasan digital muncul seiring dengan semakin luasnya penggunaan media sosial dan platform pembelajaran online. Bentuknya meliputi perundungan melalui komentar yang kasar, penyebaran foto atau video tanpa izin, penggunaan akun palsu untuk mempermalukan orang lain, serta penyebaran rumor di ruang percakapan daring. Ciri utama kekerasan digital adalah tidak terbatas oleh ruang dan waktu, sehingga korban dapat terus menerima serangan meskipun sudah berada di luar lingkungan sekolah[9].

Kekerasan struktural merupakan bentuk kekerasan yang bersumber dari kebijakan atau praktik dalam lembaga yang bersifat tidak adil. Contohnya dapat berupa ketidakmerataan akses pendidikan antara siswa dari keluarga mampu dan kurang mampu, adanya bias gender dalam materi pembelajaran, kurangnya fasilitas bagi peserta didik penyandang disabilitas, serta aturan sekolah yang membatasi kebebasan siswa. Kekerasan ini bersifat sistemik karena sudah melekat dalam struktur pendidikan, sehingga dampaknya dapat dirasakan secara luas dan dalam jangka waktu yang panjang[10].

Kekerasan berbasis religius terjadi ketika agama digunakan sebagai sarana untuk mengontrol, mendiskriminasi, atau memaksa individu di lingkungan sekolah. Bentuknya dapat berupa paksaan untuk mengikuti ibadah tertentu bagi siswa yang memiliki keyakinan berbeda, pengucilan terhadap peserta didik dengan latar belakang agama lain, atau penyalahgunaan wewenang berbasis agama untuk membatasi kebebasan siswa. Jenis kekerasan ini sangat berbahaya karena dapat merusak nilai toleransi dan keberagaman, serta menyimpangkan makna agama yang seharusnya menekankan kasih sayang, keadilan, dan saling menghormati antar sesama[11].

3.3 Dampak Kekerasan di Media Sosial

Tindak kekerasan di media sosial, seperti perundungan daring, hinaan melalui komentar, penyebaran kebencian, serta ancaman secara digital, dapat menimbulkan pengaruh besar terhadap kehidupan mental dan hubungan sosial seseorang. Kemajuan teknologi komunikasi serta meningkatnya penggunaan platform digital membuat perilaku tersebut mudah menyebar dan dilakukan kepada banyak orang dalam waktu yang singkat. Situasi ini menyebabkan korban lebih mudah mengalami stres, kecemasan, rasa takut, hingga gangguan emosional lainnya.

Salah satu dampak paling signifikan dari kekerasan di media sosial adalah terganggunya kondisi psikologis korban. Individu yang menjadi sasaran perundungan daring dapat merasakan ketakutan, kecemasan, tekanan emosional, depresi, penurunan kepercayaan diri, serta kecenderungan untuk menghindari interaksi sosial. Pada situasi tertentu, beban mental yang berkepanjangan bahkan dapat mendorong munculnya pikiran untuk melukai diri sendiri hingga tindakan bunuh diri[12]. Selain memengaruhi kondisi mental, kekerasan di media sosial juga berdampak pada pola interaksi sosial remaja. Korban umumnya menjadi lebih mudah tersinggung, cepat bereaksi secara emosional, sensitif, serta mengalami hambatan dalam menjalin hubungan dengan orang di sekitarnya. Hal ini disebabkan karena media sosial kerap dimanfaatkan sebagai wadah untuk merendahkan orang lain, menyebarkan komentar bernada negatif, serta melakukan perundungan secara terus-menerus.

Selain dampak psikologis dan sosial, kekerasan di media sosial juga dapat menyebabkan penurunan prestasi akademik pada remaja. Korban cyberbullying cenderung mengalami kesulitan berkonsentrasi, kehilangan motivasi belajar, serta menurunnya minat untuk mengikuti kegiatan sekolah karena tekanan mental yang dialami. Kondisi ini berdampak langsung pada hasil belajar dan perkembangan pendidikan peserta didik[13]. Di samping itu, kekerasan digital juga dapat menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kepribadian seseorang, seperti munculnya rasa tidak percaya terhadap orang lain, ketakutan dalam bersosialisasi, serta kecenderungan menarik diri dari lingkungan. Jika tidak ditangani dengan baik, hal ini dapat berlanjut hingga usia dewasa dan memengaruhi kualitas hubungan sosial individu[14].

Di tengah pesatnya perkembangan era digital, penggunaan media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, termasuk dalam lingkungan pendidikan. Media sosial memberikan berbagai kemudahan dalam memperoleh informasi, membangun komunikasi, memperluas jejaring sosial, serta mendukung aktivitas pembelajaran. Peserta didik, mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan dapat memanfaatkan berbagai platform digital sebagai ruang untuk bertukar informasi dan pengetahuan secara cepat tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, perkembangan media sosial juga menghadirkan persoalan baru berupa meningkatnya potensi kekerasan dalam komunikasi digital. Kekerasan yang sebelumnya lebih banyak berlangsung melalui interaksi secara langsung kini dapat berpindah ke ruang virtual dengan jangkauan yang lebih luas, penyebaran yang lebih cepat, dan dampak yang tidak kalah serius terhadap kondisi psikologis maupun sosial korban.

Kemudahan akses internet dan media sosial dalam kondisi tertentu dapat mendorong sebagian pengguna merasa memiliki kebebasan yang hampir tanpa batas dalam menyampaikan pendapat. Kebebasan tersebut menjadi persoalan ketika tidak diimbangi dengan kesadaran mengenai etika, tanggung jawab, serta penghormatan terhadap hak dan martabat orang lain. Pengguna media sosial dapat dengan mudah memberikan komentar kasar, melakukan penghinaan, menyebarkan ujaran yang merendahkan, mempermalukan seseorang, atau menyerang individu tertentu tanpa mempertimbangkan dampak yang ditimbulkannya. Karakter komunikasi digital yang

memungkinkan seseorang berinteraksi tanpa bertatap muka secara langsung juga dapat mengurangi kontrol sosial dan empati. Akibatnya, kata-kata yang mungkin sulit disampaikan secara langsung kepada seseorang justru lebih mudah dituliskan dan disebarluaskan melalui media sosial.

Dalam konteks pendidikan, kondisi tersebut perlu memperoleh perhatian serius karena peserta didik merupakan kelompok yang sangat dekat dengan penggunaan teknologi digital. Interaksi yang terjadi melalui grup percakapan, media sosial, forum pembelajaran daring, maupun berbagai platform digital lainnya dapat menjadi ruang munculnya cyberbullying dan bentuk kekerasan digital lainnya. Peserta didik dapat menjadi korban penghinaan terhadap kemampuan akademik, penampilan fisik, kondisi sosial, maupun karakteristik personal tertentu. Foto, video, atau informasi mengenai seseorang juga dapat disebarluaskan tanpa persetujuan dengan tujuan mempermalukan atau menjadikannya sebagai bahan ejekan. Berbeda dengan kekerasan konvensional yang umumnya terjadi pada ruang dan waktu tertentu, kekerasan melalui media sosial dapat berlangsung secara terus-menerus karena konten digital dapat diakses, dibagikan, dan disebarluaskan kembali oleh pengguna lainnya.

Fenomena tersebut sekaligus menunjukkan adanya tantangan terhadap pembentukan nilai moral dan etika komunikasi pada era digital. Apabila perilaku menghina, merendahkan, mengejek, dan menyerang orang lain terus-menerus dilakukan serta memperoleh respons berupa dukungan atau dianggap sebagai hiburan, maka tindakan tersebut berpotensi mengalami normalisasi. Pengguna media sosial, khususnya peserta didik, dapat membentuk pemahaman bahwa komunikasi agresif merupakan sesuatu yang wajar dalam interaksi sosial. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat memengaruhi pola komunikasi di dunia nyata. Sikap saling menghormati, toleransi, empati, kesantunan, dan tanggung jawab dalam berkomunikasi berpotensi mengalami penurunan apabila ruang digital tidak digunakan secara bijaksana.

Oleh karena itu, pencegahan kekerasan di media sosial tidak dapat hanya dilakukan melalui pembatasan penggunaan teknologi, tetapi perlu diarahkan pada penguatan literasi digital dan pendidikan karakter. Institusi pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk peserta didik agar mampu memahami bahwa kebebasan berekspresi di ruang digital harus disertai tanggung jawab moral dan sosial. Pendidikan mengenai etika digital, empati, kesantunan berkomunikasi, penghormatan terhadap privasi, serta kemampuan mengenali dan mencegah cyberbullying perlu diintegrasikan dalam proses pendidikan. Kolaborasi antara sekolah, keluarga, masyarakat, dan peserta didik juga diperlukan untuk membangun ekosistem digital yang sehat. Dengan demikian, perkembangan teknologi tidak menjadi ruang baru bagi reproduksi kekerasan, tetapi dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk membangun komunikasi yang edukatif, inklusif, beretika, dan menghargai martabat setiap individu [15].

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis menilai bahwa eskalasi kekerasan di ranah digital merupakan manifestasi dari kegagalan kolektif dalam mengimbangi pesatnya kemajuan teknologi dengan kesadaran etis. Muncul kesenjangan yang signifikan antara keterampilan teknis penggunaan gawai dengan kematangan kewarganegaraan digital (digital citizenship). Jika kebijakan preventif tidak segera diintegrasikan dalam lingkungan sosial dan pendidikan, dampak sistemis pada capaian akademik serta degradasi interaksi sosial berisiko menciptakan generasi yang terbelenggu oleh kecemasan dan krisis kepercayaan. Dengan demikian, penguatan literasi digital harus melampaui aspek teknis dengan menyentuh dimensi kecerdasan emosional. Sinergi antara institusi pendidikan, keluarga, dan pengembang platform sangat krusial untuk membangun ekosistem digital yang aman guna mencegah permanensi pola komunikasi toksik yang mengancam tatanan moral masyarakat.

4. Kesimpulan

Kekerasan dalam dunia pendidikan di era digital menjadi masalah serius yang mencakup kekerasan fisik, verbal, psikologis, hingga cyberbullying. Perkembangan teknologi dan media sosial sering disalahgunakan untuk melakukan penghinaan, intimidasi, dan perundungan daring yang berdampak besar pada kesehatan mental, kehidupan sosial, dan prestasi akademik peserta didik. Masalah ini terjadi karena masih rendahnya kesadaran etika digital dalam penggunaan teknologi.

Dengan demikian, upaya pencegahan kekerasan dalam pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh melalui kerja sama antara sekolah, keluarga, pemerintah, dan masyarakat. Sekolah perlu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif dengan menerapkan pendidikan karakter serta pengawasan terhadap penggunaan media digital. Orang tua juga memiliki peran penting dalam membimbing dan mengawasi perilaku anak di dunia maya. Selain itu, diperlukan penguatan pendidikan moral, kecerdasan emosional, dan kesadaran digital agar teknologi dapat dimanfaatkan secara positif untuk mendukung perkembangan pendidikan dan membangun generasi yang berakhlak, saling menghormati, serta bebas dari budaya kekerasan.

Referensi

- [1] N. P. Astiyan Putra, "ANALISIS KASUS KEKERASAN DALAM PENDIDIKAN (STUDI KASUS PENGANAYAAN GURU TERHADAP SISWA DI JOGOROTO-JOMBANG)," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, vol. 25, no. 1, 2023, doi: 10.26623/jdsb.v25i2.4204.
- [2] Winna Clara Shinta, "ANALISIS PENTINGNYA PENDIDIKAN ANTI KEKERASAN DALAM LINGKUNGAN KELUARGA DAN SEKOLAH," *EduMatSains : Jurnal Pendidikan, Matematika dan Sains*, 2023, doi: 10.33541/edumatsains.v8i1.5105.
- [3] U. & S. Y., "Kekerasan dalam pendidikan," *Jurnal Kajian Pendidikan Islam Dan Keagamaan*, vol. 6, no. 2, 2022.
- [4] ahmad fauzi, " Fenomena cyberbullying di lingkungan pelajar: Perspektif pendidikan Islam," *Pendidikan Diniyah*, 2020.

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.12930>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

-
- [5] M. helena Lohy and F. Pribadi, "KEKERASAN DALAM SENIORITAS DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN," *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, vol. 5, no. 1, 2021, doi: 10.38043/jids.v5i1.2938.
- [6] & ibrahim whardana, "Tipologi kekerasan dalam pendidikan dan relevansinya terhadap upaya pencegahan berbasis nilai Islam," *Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 13, no. 1, pp. 25–35, 2026.
- [7] I. Arifin, Nirwana, Nurmagfira, and Aksayanti, "Dinamika Cyberbullying di Media Sosial dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Sosial Remaja," *DISCOURSE: Indonesian Journal of Social Studies and Education*, vol. 2, no. 2, 2025, doi: 10.69875/djosse.v2i2.133.
- [8] T. Ardyah Rahmadani and N. Harahap, "Dampak Cyberbullying di Media Sosial pada Perilaku Reaktif Remaja di Desa Sei Rotan," *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, vol. 8, no. 2, 2023, doi: 10.33506/jn.v8i2.2372.
- [9] M. F. Mu'tazza and S. Gumindari, "Peran Pendidikan Agama Islam dalam Kekerasan Berbasis Gender Online pada Remaja di Cirebon," *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, vol. 5, no. 6, 2024, doi: 10.54373/imej.v5i6.2370.
- [10] tang syarifudin, "Implementasi model pendidikan Islam multikultural sebagai strategi pencegahan kekerasan dalam lingkungan STAI Al-Furqan Makassar," *Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, vol. 5, no. 1, 2025.
- [11] N. Septantiningtyas, "Pencegahan Bullying Berbasis Nilai-Nilai Islam Di Sekolah Dasar," *Jurnal Pendidikan Karakter*, vol. 15, no. 1, pp. 22–36, 2025.
- [12] F. T. Yulieta, H. N. A. Syafira, M. H. Alkautsar, S. Maharani, and V. Audrey, "Pengaruh Cyberbullying di Media Sosial Terhadap Kesehatan Mental," *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol. 1, no. 8, 2021, doi: 10.56393/decive.v1i8.298.
- [13] D. P. , & W. R. Sari, "Dampak Cyberbullying terhadap Motivasi Belajar Siswa," *Jurnal Pendidikan Karakter*, vol. 12, no. 2, pp. 145–152, 2022.
- [14] N. A. Putri, "Pengaruh Kekerasan Siber terhadap Pembentukan Kepribadian Remaja," *Jurnal Psikologi Pendidikan*, vol. 10, no. 1, pp. 55–63, 2022.
- [15] N. P. A. Putra, "Analisis Kasus Kekerasan Dalam Pendidikan (Studi Kasus Penganayaan Guru Terhadap Siswa Di Jogoroto-Jombang)," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, vol. 25, no. 1, 2023.